

**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo)**

**Yusnar<sup>1)</sup>, A. Dahri Adi Patra LS<sup>2)</sup>, Haedar<sup>3)</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

Jln. Jendral Sudirman KM 03, Kota Palopo

Email : yusnarputriilham10@gmail.com

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Seluruh Pegawai dan Dewan di Sekretariat DPRD Kota Palopo. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner penelitian menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,187 % hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah Kota Palopo telah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Untuk itu diharapkan penerapan *Good Government Governance* di pemerintahan di Kota Palopo di implementasikan secara baik, untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

**Kata Kunci:** *Good Government Governance*, Kinerja Pemerintah Daerah

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Good Government Governance on the Performance of the Regional Government of Palopo City. The population and sample of this study were all employees and boards of the Palopo City DPRD*

*Secretariat. The sampling technique used purposive sampling. The data collection method used a questionnaire. The research questionnaire uses a Likert scale. Data analysis used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The results of hypothesis testing show that Good Government Governance on Local Government Performance with a coefficient value of 0.187% shows that the governance of the Palopo City government has been running well, but still needs to be improved. For this reason, it is hoped that the implementation of Good Government Governance in the government in Palopo City will be implemented properly, to improve government performance.*

***Keywords:*** *Good Government Governance, Local Government Performance*

---

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah bahwa Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan harapan memberi dampak positif bagi kepentingan publik dalam menciptakan strategi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004).

Isu mengenai kinerja pegawai pemerintah sangat menjadi sorotan publik saat ini, karena belum menampakan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat

menuntut agar pemerintah dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintah dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyebutkan, lemahnya kinerja yang paling menonjol disejumlah SKPD lainnya yakni yang terkait menyangkut bidang kesehatan, pendidikan pemerataan pembangunan instruktur, dan pertanian. Ia mengaku khawatir, dengan lemahnya kinerja SKPD, hal itu akan mempengaruhi dalam mengambil kebijakan optimalisasi pelayanan yang prima dan maksimal bagi masyarakat, menurut Dadan, SKPD sangat erat kaitannya dalam menentukan setiap kebijakan-kebijakan yang ada di daerah (RMOLjabar.com,2016). Pengusaha masih merasakan kekecewaan atas kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dan pusat yang belum mampu mengkoordinasikan kebijakannya secara nasional. Ini ditekankan karena hingga saat ini masih banyak kebijakan yang cenderung tumpang tindih antara kehendak pemerintah pusat dan daerah

yang akibatnya merugikan iklim investasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Salah seorang pendiri Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sofjan Wanandi Opini yang diberikan mengungkapkan hal tersebut saat berbicara dalam penyerahan penghargaan KPPOD bagi pemerintah daerah yang dinilai mampu melaksanakan tata kelola ekonomi lokal dengan baik. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sofjan, otonomi daerah yang diterapkan di daerah saat ini dilakukan secara setengah hati oleh pemerintah pusat sehingga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga menjadi tidak maksimal. Sementara itu, daerah juga kerap berjanji membuat pusat pelayanan satu atap (one stop services/OSS), tetapi kenyataannya masih saja terjadi tekanan-tekanan kepada pelaku usaha. Sebagai pengusaha kami sering dikecewakan karena ketika pemerintah menerbitkan paket-paket kebijakan

yang mendorong pemulihan iklim investasi, kami merasa optimistis. Namun, realisasi paket kebijakan itu malah tidak ada. Contohnya, daerah tetap saja membebankan pajak listrik penerangan jalan, padahal pasokan listrik sendiri sering terganggu. Meski demikian, Sofjan mengakui, masih ada harapan. Sebab, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang telah berupaya memberikan dukungan kepada dunia usaha. Sudah mulai ada daerah yang memberikan insentif bagi dunia usaha. Saya berharap ini bisa ditiru oleh daerah lain (<https://travel.kompas.com,2015>).

Di mata masyarakat kinerja pemerintah selalu menjadi suatu perhatian besar dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan suatu program kerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang belum maksimal dan

pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah yang masih harus diperbaiki.

Dengan adanya paparan diatas tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul **“Pengaruh *Good Government Governance* (GGG) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo” (Studi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo).**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan Apakah *Good Government Governance* berpengaruh

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tema yang telah di pilih oleh penulis, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

#### **2. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

#### **3. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai tata pemerintahan yang baik.

##### **b. Bagi pemerintah**

Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

##### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Good Government Governance***

Menurut Sutedi (2011:3) Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.

## **Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Nurlaila (2010:71) pengertian kinerja adalah *performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.

Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi. Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan kerja sangat mempengaruhi bagi diri karyawan untuk dapat berusaha mencapai potensi kerja secara masyarakat.

### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terhadap “Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo” belum banyak ada. Tetapi banyak penelitian sebelumnya yang memiliki sebagian kesamaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Azlina dan Amelia (2014) Melakukan Penelitian Berjudul “Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Selalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah dan bawah di SETDA Kabupaten Pelalawan.

Nurlaela (2015) melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh *Good Government Governancedan* Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” Penerapan tata kelola yang baik dan akuntabilitas sangat penting untuk mendukung kualitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Kinerja lembaga pemerintah adalah pencapaian kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas terhadap kinerja daerah

lembaga pemerintah di kabupaten Ciamis.

Rahayu (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pemerintah Kabupaten Gresik” Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi, dan supremasi hukum terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gresik. Penelitian ini penting terutama dalam kinerja keuangan. SKPD masih banyak pemborosan dan inefisiensi yang sangat penting dalam terwujudnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda. Jumlah sampel yang diambil 31 responden dan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner untuk mendapatkan data. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, partisipasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik, dan aturan UU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan teoritis dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Didukung oleh penelitian Azlina dan Amelia (2014) Melakukan Penelitian Berjudul “Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal

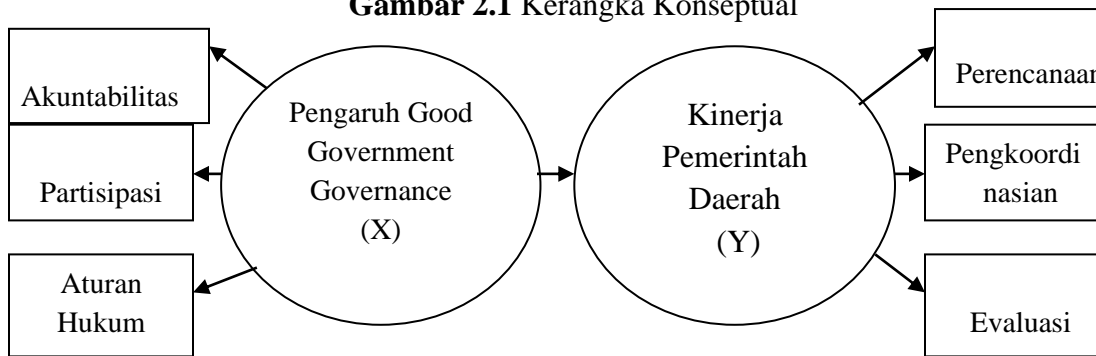
terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Selalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah dan bawah di SETDA Kabupaten Pelalawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis regresi linier digunakan sebagai metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel valid, reliabel, dan penuh dengan konsumsi klasikal. Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa Pemerintahan yang Baik dan Pengendalian Internal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Pelawan.

**Kerangka Konseptual**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah jalan penerapan otonomi daerah di Indonesia dan direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri (secara mandiri) urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual



**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor DPRD Kota Palopo, dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bulan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah 70 responden di kantor DPRD Kota Palopo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini



adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan data primer, yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuisioner yang diedarkan secara langsung.

Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis observasi dan angket. Teknis analisis data yang digunakan antara lain : (1) Analisis Deskriptif, (2) Uji Validitas dan Uji Realibilitas, (3) Analisis Regresi Linear Berganda, (4) Uji F.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini melibatkan 70 responden, untuk memberikan informasi terkait pengaruh *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 70 responden dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Kemudian hasil reliabilitas pada penelitian inipun reable yaitu dibuktikan semua koefisien lebih besar dari 0,60 maka semua pernyataan dinyatakan reable.

Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa ada pengaruh simultan antara *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan nilai signifikan  $0,035 < 0,05$  dengan nilai  $F_{hitung} 4,631 > 3,98$ . Sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bagian dari teori keagenan yaitu teori *stewardship*. Menurut Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa teori ini adalah sebuah teori yang merupakan bentuk dari gambaran atas suatu situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan dan kepentingan individu melainkan lebih memperhatikan dan memperhatikan suatu hubungan yang erat antara kesuksesan dan keputusan, sehingga tercapainya sebuah kesuksesan dalam suatu organisasi tersebut akan menunjukkan kemaksimalannya dalam utilitas principals dan manajemennya tersebut sehingga dapat terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut.

Didukung oleh penelitian Azlina dan Amelia (2014) Melakukan Penelitian Berjudul “Pengaruh *Good*

*Governance* Dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Selalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer menengah dan bawah di SETDA Kabupaten Pelalawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner. Analisis regresi linier digunakan sebagai metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan semua variabel valid, reliabel, dan penuh dengan konsumsi klasikal. Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa Pemerintahan yang Baik dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Pelawan.

Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Gustianra dan Serly (2019) melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh *Good Government Governance* Dan Ukuran Legislatif

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” yang diukur dengan peringkat Indonesia *Governance Index* (IGI) dan ukuran legislatif dengan menggunakan jumlah anggota DPRD kabupaten, dan juga kinerja pemerintah daerah yang diukur oleh tiga proxy, yaitu PDB per kapita, Tingkat Kemiskinan, Rasio Kemerdekaan, Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat pengangguran. Studi ini dilakukan di 33 kabupaten di Indonesia pada tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa dua tidak ada pengaruh yang signifikan dari tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Independensi dan Pertumbuhan Ekonomi. Tidak ada pengaruh signifikan pada ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang di lakukan bahwa diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 25,929 + 0,187 X + e$$

konstanta sebesar 25,929 menyatakan bahwa jika tidak ada *good government*

*governance* , maka kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo dan akan sebesar 25,929. koefisien  $X = 0,187$ , menunjukkan bahwa *good governance* (X) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kota palopo d. Hal ini berarti bahwa jika *good governance* ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah kota palopo.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor BPKD Kabupaten luwu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor BPKD Kabupaten luwu. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

pada Kantor BPKD Kabupaten Luwu. Sehingga hipotesis kedua diterima.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain:

1. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen untuk mempengaruhi Kinerja keuangan daerah.
2. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah secara umum karena penelitian ini hanya mengambil

populasi di Kantor BPKD Kabupaten Luwu.

### **Saran**

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel yang belum dimasukkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi dan *good government governance* terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.
3. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja, tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Abdullah, R. S. (2000). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1).

Agoes, S. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.

Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu*

*PendekatanPraktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Azlina. N dan Amelia. I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Internterhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Bisnis*, 9, 2.

C. Claraini, E. Savitri, dan M. W. (2017). *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan*

- Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. (Ke Tujuh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustianra dan Serly. (2019). *Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.*
- Hasan, M. I. (2001). *Pokok-pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Bumi Aksara.
- Hutapea, F. L dan Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol.9 (No.1), 9, 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintah.*
- Indriantoro, N. dan S. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.). Yogyakarta: BPF.
- Intihanah dan Muthia, S. N. . (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Retrieved from Ojs.Uho.Ac.Id.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). *Lembaga Admisitrasi Negara. SANKRI Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara.*
- Magkunegara, A. A. A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahsun. (2006). ). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9, 1.
- Mardiasmo. (2004). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap

- Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9, 1.
- Moehariono. (2012). Pengaruh Kemampuan, Usaha Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala Semarang*.
- Nurlaela W.S. (2015). Pengaruh Good Government Governancedan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah(Survei Pada Dinas Skpd Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nurlaila. (2010). Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Stres Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Askrindo. *Http://Respository.Unissula.Ac.Id /Id/Eprint/8270*. 24 Nov 2017 (03:01).
- Rahayu. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Good Government Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pemerintah Kabupaten Gresik*.
- Soedarmayanti. (2012). Pengaruh Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Organisasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Http://Repository.Unpas.Ac.Id/Id/Eprint/41384*. 09 Maret 2019 (11:11).
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunarmo, A dan Widianingsih, R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Journal.Ummgl.Ac.Id*.
- Suryabrata. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grapindo Persada.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IUndang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemerintah.
- Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18

- tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Nomor 23 tahun 2014.  
Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
1999. tentang Otonomi Daerah
- Widjaja, T. . (2012). *Pengaruh  
Implementasi Good Government  
Governance Terhadap  
Akuntabilitas Keuangan Dan  
Dampaknya Pada Kinerja  
Keuangan Pemerintah Daerah. 1,*  
127.
- Wiguna. (2016). Pengaruh Teknologi  
Informasi, Pengendalian Intern,  
Gaya Kepemimpinan Dan Good  
Governance Terhadap Kinerja  
Instansi Pemerintah (Studi  
Empiris Pada Skpd Kabupaten  
Bengkalis). *Jurnal Ekonomi, 24,*  
1.
- Yudhasena, I.G dan Putri, A. M. A.  
(2019). Pengaruh Good  
Government Governance  
Pengendalian Intern Dan Budaya  
Organisasi Terhadap Kinerja  
Organisasi Perangkat Daerah  
(OPD). *Jurnal Akuntansi, 28, 1.*
- ([https://travel,kompas.com](https://travel.kompas.com),2015).
- ([RMOLjabar.com](http://RMOLjabar.com),2016).
- (<http://www.coursehero.com>).
- ([https://www.google.com/search?q=pe  
rwal+sekretariat+dprd+kota+palopo.](https://www.google.com/search?q=perwal+sekretariat+dprd+kota+palopo))